

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Munculnya fenomena penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia patut dikhawatirkan.¹ Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk evaluasi dan kontrol terhadap pemimpin atau penyelenggaraan pemerintahan.² Menurut Almond, Verba, & Sidney partisipasi politik merupakan jantungnya demokrasi.³ Rendah atau ketiadaan sama sekali partisipasi politik adalah permasalahan terhadap praktik berdemokrasi.⁴ Pemilu yang digelar dengan keikutsertaan secara penuh masyarakat, akan memberikan legitimasi terhadap calon atau pasangan calon yang terpilih. Berikut *trend* penurunan partisipasi politik masyarakat dalam beberapa kali pemilu yang dilaksanakan di Indonesia:



Tabel 1.1 Perbandingan Partisipasi Memilih dalam Pemilu Tahun 2004 - 2014

No.	Tahun	Tingkat Partisipasi dan Jenis Pemilu Legislatif	Partisipasi Pemilu Presiden	Rata-rata Golput
1.	2004	84,1%	- putaran pertama 78,2% - putaran kedua 76,6%	18,85%
2.	2009	70,9%	71,7%	28,7%
3.	2014	75,11%	70%	25-30%

Sumber: Diolah dari Panji Surianto, 2020.

Tabel 1.1 di atas memperlihatkan rata-rata tingkat partisipasi memilih

¹ Surianto, Panji. 2018. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pada Pilkada Serentak di Kabupaten Karo Tahun 2015. *Tesis*. Medan: Universitas Sumatera Utara. Hlm. 5

² Liando, Daud. M. 2016. Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol. 3(2). Hlm. 14-28

³ Olsson, Sofia Arkhede. 2014. Corruption and Political Participation: A Multilevel Analysis. QoG Working Paper Series 12. University of Gothenburg. Hlm. 1

⁴ Febriantanto, Pangky. 2019. Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017. *Jurnal PolGov*. Vol 1(1). Hlm. 157-190

masyarakat Indonesia dalam tiga kali pemilu yang digelar pasca Reformasi. Berdasarkan tabel tersebut partisipasi memilih masyarakat Indonesia telah mengalami penurunan hingga berada di angka 70%. Secara konvensional partisipasi politik dimaknai sebagai keikutsertaan warga negara dalam aktivitas-aktivitas yang dapat mempengaruhi struktur pemerintah, pemilihan wakil, dan kebijakan.⁵ Pengertian lain yang juga sering dikutip adalah partisipasi sebagai tindakan warga dimana mereka berusaha mempengaruhi atau mendukung pemerintahan dan politik atau semua kegiatan warga secara sukarela untuk mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung pilihan politik pada berbagai tingkat pada sistem politik.⁶



Sampai saat ini indikator utama (*mainstream*) yang digunakan dalam melihat sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam setiap momen atau aktifitas politik, adalah kehadiran dalam pemberian suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Padahal, partisipasi politik jika dilihat dari segi bentuknya terdiri atas banyak aktifitas/kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat untuk mengekspresikan hak politiknya, seperti: protes, a-politik, golongan putih (golput), memilih, dan sebagainya.⁷ Sedangkan menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson bentuk-bentuk partisipasi politik terbagi menjadi: kegiatan pemilihan, kegiatan organisasi, *lobby*, *contacting*, dan tindakan kekerasan/*violence*.⁸

⁵ Putnam, Robert D. 1995. Tuning In, Tuning Out: The Stranger Disappearance Of Social Capital In American Youth 1976-1995. Jurnal *Political Science and Politics*, 28, Hlm. 664-683

⁶ Milbrath. L. W., & Goel, L. 1977. *Political Participation: How and Why People Get Involved in Politics*. Chicago: Rand McNally. Hlm. 123-124

⁷ Kuncoro, Muhammad Wahyu. 2018. Media Sosial, *Trust*, dan Partisipasi Politik Pemilih Pemula. Prosiding Seminar Nasional Psikologi Unissula: Penguatan Keluarga di Zaman *Now*. Hlm. 161-168

⁸ Huntington, S.P & Joan M. Nelson. 1984. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, Hlm. 6-7

Menurunnya tingkat partisipasi memilih masyarakat dalam pemilu dipengaruhi oleh beragam faktor.⁹ Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik terbagi menjadi: faktor sosial ekonomi (ukuran populasi, stabilitas populasi, perkembangan ekonomi), faktor politik (kedekatan menuju tempat pemilihan, persepsi terhadap isu politik yang sedang berkembang, pelaksanaan kampanye, perpecahan dalam politik), faktor kelembagaan (sistem pemilu, pemungutan suara wajib, pemilu terkini/terbaru, persyaratan pendaftaran, susunan pemilu), dan juga faktor individual (umur, pendidikan, kepentingan politik, tanggung jawab kewarganegaraan).

Penelitian dan upaya untuk membahas faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat sudah banyak dilakukan. Penelitian yang sudah dilaksanakan di beberapa negara antara lain dilakukan oleh: Shapiro & Winters tentang pengaruh partisipasi politik terhadap kepuasan hidup di beberapa negara Amerika Latin.¹⁰ Inman & Andrews tentang pengaruh persepsi korupsi terhadap partisipasi politik pada beberapa negara demokrasi baru di Afrika.¹¹ Flavin & Keane tentang pengaruh kepuasan hidup terhadap partisipasi politik di Amerika Serikat.¹² Olsson tentang pengaruh persepsi korupsi terhadap partisipasi politik di 33 Negara dunia.¹³ Serta penelitian Zheng, et. al tentang pengaruh persepsi korupsi

⁹ Solijonov, Abdurashid. 2016. Voter Turnout Trends around The World. Stockholm: International IDEA. Hlm. 35-40

¹⁰ Shapiro, Rebecca Weitz & Winters, Matthew S. 2008. Political Participation and Quality of Life. Working Paper, No. 638 Inter-American Development Bank, Research Department, Washington, DC. Hlm. 1-53

¹¹ Inman, Kris & Andrews, Josephine T. 2009. Corruption and Political Participation in Africa: Evidence from Survei and Experimental Research. Chicago, I.L: *Paper presented at the 2008 meetings of the Midwest Political Science Association*, April 3-6. Hlm. 1

¹² Flavin, Patrick & Keane, Michael J. 2012. Life Satisfaction and Political Participation: Evidence from the United States. *Jurnal Happiness Studies*, 13 (63-78). Hlm. 64-78

¹³ Olsson, Sofia Arkhede. 2014. Corruption and Political Participation: A Multilevel Analysis. QoG Working Paper Series. University of Gothenburg. Hlm. 1-53

dan kepuasan hidup terhadap partisipasi politik di China.¹⁴

Pemilu di Indonesia terus dilaksanakan dan masih belum ada kajian secara akademik yang dapat digunakan oleh berbagai pihak di Indonesia, untuk menggambarkan seperti apa model partisipasi politik masyarakat Indonesia. Kalaupun ada kajian tersebut masih belum menggunakan indikator yang lengkap, dan hasilnya pun masih belum memuaskan. Kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya di Indonesia antara lain: hanya mengukur tingkat partisipasi politik masyarakat sebagaimana penelitian Hasbi Wahyudi, et. al.¹⁵ Fitriah masih belum mencerminkan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi politik, dikarenakan variabel yang digunakan hanya berfokus pada faktor individual masyarakat.¹⁶ Sedangkan Pangky Febriantanto masih belum menggambarkan pengaruh setiap indikator terhadap peningkatan partisipasi memilih kelompok disabilitas dalam Pilkada Yogyakarta Tahun 2017, dan signifikansinya terhadap kelompok masyarakat lainnya di Indonesia.¹⁷

Hasil berbagai penelitian terdahulu di atas telah mengidentifikasi bahwa terdapat hubungan antara persepsi korupsi dan kepuasan hidup terhadap partisipasi politik terutama dalam pemilu. Penelitian ini akan melanjutkan pembahasan tentang hubungan persepsi korupsi dan kepuasan hidup terhadap partisipasi politik dalam konteks Pemilu Presiden (Pilpres). Hal ini dikarenakan peneliti belum menemukan

¹⁴ Zheng, Wen-wen, et. al. 2016. Life Satisfaction as Buffer of the Relationship Between Corruption and Political Participation. *Social Indicator Research* Hlm. 1-17

¹⁵ Wahyudi, et. al. 2013. Peran Kepercayaan Politik dan Kepuasan Demokrasi terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa. *Jurnal Psikologi*, Vol. 9 (2). Hlm. 94-99

¹⁶ Fitriah, Elis Anisah. 2014. Personal Values Dan Internal Political Efficacy Terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa Pemilih Pemula. *Jurnal Psymphatic*, Vol. 1(2). Hlm. 244-254

¹⁷ Febriantanto, Pangky. 2019. Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017. *Op. Cit*

kajian tentang hubungan antara persepsi korupsi dan kepuasan hidup terhadap partisipasi politik di dalam Pilpres. Penelitian ini juga penting secara akademis karena membahas hubungan antara persepsi korupsi, kepuasan hidup, serta partisipasi politik menggunakan teknik *Structural Equation Modeling* (SEM). *Structural Equation Modeling* (SEM) merupakan suatu teknik analisis yang menggabungkan pendekatan antara Analisis Faktor (*factor analysis*), model struktural (*structural model*), dan analisis jalur (*path analysis*) dari model yang dibangun/ditawarkan berdasarkan konsep-konsep yang telah ada sebelumnya.¹⁸

1.2. Rumusan Masalah

Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 di seluruh Indonesia, memiliki perbedaan dari pemilu-pemilu yang telah digelar sebelumnya. Dari segi pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 dimaksudkan untuk memilih secara langsung dan serentak Anggota Legislatif (Pileg) maupun pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Pemilu yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia ini, telah menghasilkan peningkatan partisipasi memilih masyarakat terutama di daerah Sumatera Barat. Partisipasi memilih masyarakat Sumatera Barat dalam Pilpres Tahun 2019 berada di angka 79%¹⁹, telah meningkat dibandingkan Pilpres Tahun 2014 yang hanya 65,19%²⁰.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat hanya menargetkan

¹⁸ Sugiyono. 2010. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. Hlm. 323

¹⁹ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat. 2019. Partisipasi Masyarakat Sumatera Barat dalam Pemilu Presiden 2019. Diakses dari: https://sumbar.kpu.go.id/index.php/hasil_pemilu pada 16 Maret 2020

²⁰ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat. 2014. Partisipasi Masyarakat Sumatera Barat dalam Pemilu Presiden Tahun 2014. Diakses dari: https://sumbar.kpu.go.id/index.php/arsip_pemilu/pilpres pada 16 Maret 2020

partisipasi masyarakat berada di angka 75%.²¹ Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI juga telah mengingatkan bahwa Sumatera Barat adalah daerah yang rawan terkait partisipasi pemilih.²² Ternyata, partisipasi memilih masyarakat Sumatera Barat melebihi target yang ditetapkan KPU RI²³ serta melampaui target yang ditetapkan KPU Sumatera Barat yang hanya 75%. Berikut sebaran partisipasi memilih masyarakat Sumatera Barat dalam Pilpres Tahun 2019:

Tabel 1.2 Partisipasi Masyarakat Sumatera Barat dalam Pemilihan Presiden 2019

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah DPT	Tingkat Partisipasi
1	Kab. Pesisir Selatan	331.260	81,6 %
2	Kab. Solok	281.902	74,5 %
3	Kab. Sijunjung	156.595	81,4 %
4	Kab. Tanah Datar	276.615	72,7 %
5	Kab. Padang Pariaman	313.987	69,5 %
6	Kab. Agam	365.029	71,5 %
7	Kab. Limapuluh Kota	265.161	81,0 %
8	Kab. Pasaman	199.836	81,5 %
9	Kab. Kep. Mentawai	63.103	80,5 %
10	Kab. Dharmasraya	143.907	89,0 %
11	Kab. Solok Selatan	114.161	83,1 %
12	Kab. Pasaman Barat	250.723	88,1 %
13	Kota Padang	592.162	80,0 %
14	Kota Solok	47.418	86,4 %
15	Kota Sawahlunto	45.778	85,2 %
16	Kota Padang Panjang	38.781	82,5 %
17	Kota Bukittinggi	81.447	78,0 %
18	Kota Payakumbuh	88.849	84,4 %
19	Kota Pariaman	61.523	84,3 %
Total		3.718.237	79,0 %

Sumber: Diolah dari KPU Sumatera Barat, 2019

Tabel 1.2 di atas memperlihatkan rata-rata partisipasi memilih masyarakat

²¹ Haluan. 2019. Partisipasi Pemilih Sumbar Meningkat di Pemilu 2019, Begini Kata Pengamat. Diakses dari <http://www.harianhaluan.com/mobile/detailberita/73930/partisipasi-pemilih-sumbar-meningkat-di-pemilu-2019-begini-kata-pengamat> pada 16 Maret 2020

²² Antara. 2019. Bawaslu: Ada 16 Provinsi Rawan pada Pemilu 2019. Diakses dari: <https://www.antaraneews.com/berita/822601/bawaslu-ada-16-provinsi-rawan-pada-pemilu-2019> pada 16 Maret 2020

²³ Kompas.com. 2019. Pemilu 2019, KPU Optimistis Target 77,5 Persen Partisipasi Pemilih Tercapai. Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/18/12453331/pemilu-2019-kpu-optimistis-target-775-persen-partisipasi-pemilih-tercapai> pada 16 Maret 2020

Sumatera Barat yang berada di angka 79%, dan tergolong pada kategori yang tinggi. Jika melihat faktor-faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya tingkat partisipasi politik dalam pemilu sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdurashid Solijonov²⁴, peneliti berhipotesis bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi memilih masyarakat dalam Pilpres Tahun 2019 di Sumatera Barat.

Seiring peningkatan partisipasi memilih masyarakat Sumatera Barat tersebut, hasil survey *Transparency International* menyatakan bahwa telah terjadi peningkatan skor indeks persepsi korupsi di Indonesia. Dalam rentang tahun 2011 hingga tahun 2019 terlihat *trend* peningkatan indeks persepsi korupsi yang positif di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2011-2019

No	Tahun	Skor	Rank/Total Negara
1	2011	30	100/182
2	2012	32	118/174
3	2013	32	114/175
4	2014	34	107/174
5	2015	35	88/166
6	2016	37	90/176
7	2017	37	96/180
8	2018	38	89/180
9	2019	40	85/180
	Rata-rata	35	99/176

Sumber: Diolah dari Tim Riset *Transparency International* Indonesia

Tabel 1.3 di atas menampilkan rentang waktu dan skor indeks persepsi korupsi Indonesia sejak tahun 2011 hingga 2019 dengan *trend* yang positif. Meskipun terlihat *trend* yang positif, persoalan korupsi masih menjadi hal yang paling disorot di Indonesia.²⁵ Sementara skor indeks persepsi korupsi Sumatera

²⁴ Solijonov, Abdurahid. 2016. *Voter Turnout Trends around The World*. Stockholm: International IDEA. *Op. Cit*

²⁵ Menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Pemerintahan Daerah adalah lembaga dengan jumlah korupsi terbanyak. ICW mencatat ada 267 kasus dengan 378 tersangka yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 1,3 Triliun. Lebih lanjut lihat di

Barat yang diwakili Kota Padang berada pada angka 63,1, dan meningkat bila dibandingkan sebelumnya yang hanya berada di angka 50,0 pada tahun 2015.²⁶

Berikut gambaran peningkatan skor indeks persepsi korupsi tersebut:

Tabel 1.4 Perbandingan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2017 dan 2015

No.	Nama Daerah	Indeks Persepsi Korupsi	
		2015	2017
1.	Kota Jakarta Utara	57,0	73,9
2.	Kota Pontianak	58,0	66,5
3.	Kota Pekanbaru	42,0	66,5
4.	Kota Balikpapan	57,0	64,3
5.	Kota Banjarmasin	68,0	63,7
6.	Kota Padang	50,0	63,1
7.	Kota Manado	55,0	62,8
8.	Kota Surabaya	65,0	61,4
9.	Kota Semarang	60,0	58,9
10.	Kota Bandung	39,0	57,9
11.	Kota Makassar	48,0	53,4
12.	Kota Medan	57,0	37,4
	Rata-rata	54,7	60,8

Sumber: Diolah dari *Transparensi International Indonesia, 2017*, Hlm. 12

Tabel 1.4 di atas memperlihatkan peningkatan indeks persepsi korupsi di Indonesia dari tahun 2015 ke tahun 2017. Berdasarkan tabel 1.4 di atas, 8 dari 12 kota yang disurvei mengalami peningkatan dimana Sumatera Barat termasuk daerah yang juga mengalami peningkatan. Korupsi umumnya mengacu pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi.²⁷ Secara teoritis korupsi tidak hanya berdampak pada perekonomian dan kehidupan sosial.²⁸ Korupsi juga berdampak negatif terhadap kehidupan politik seperti berkurangnya

<https://antikorupsi.org/id/article/terpilihnya-tersangka-korupsi-dalam-pilkada-2018>

²⁶ Suyatmiko, Wawan & Ratnaningtyas, Sekar. 2017. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017 (Survei Antara Pelaku Usaha di 12 Kota di Indonesia). *Transparency International Indonesia*. Hlm. 7

²⁷ Hamdani, Rizki, et al. 2017. The Classification of Corruption in Indonesia: A Behavioral Perspective. *SHS Web Conferences* 34, Hlm. 1-10.

²⁸ Pulok, Mohammad Habibullah & Moin Uddin Ahmed. 2017. Does corruption matter for economic development? Long Run Evidence From Bangladesh . *International Journal of Social Economics: Bradford*. Vol. 44, Issue. 3: Hlm. 350-361

minat masyarakat terhadap partisipasi politik, kualitas demokrasi menjadi terganggu, dan sulitnya terwujud kesetaraan sosial.²⁹ Apakah peningkatan indeks persepsi korupsi ini berhubungan dengan peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam Pilpres Tahun 2019 di daerah Sumatera Barat?

Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 juga menyatakan telah terjadi peningkatan indeks kepuasan hidup yang dimiliki masyarakat Sumatera Barat. Indeks kepuasan hidup masyarakat Sumatera Barat pada tahun 2014 berada di angka 66,79, sedangkan pada tahun 2017 indeks kepuasan hidup tersebut telah meningkat ke angka 70,42. Gambar berikut memperlihatkan peningkatan indeks kepuasan hidup tersebut:



Gambar 1.1 Indeks Kepuasan Hidup Masyarakat Sumatera Barat Tahun 2014 & 2017

Sumber: Data Sosial Ekonomi Provinsi Sumatera Barat, 2019, Hlm. 97

Gambar 1.1 di atas yang memperlihatkan peningkatan indeks kepuasan hidup masyarakat Sumatera Barat dari tahun 2014 ke tahun 2017. Kepuasan hidup adalah konstruksi psikologis utama yang berfungsi sebagai kekuatan psikologis dalam diri seseorang terhadap kondisi kehidupan yang didasarkan pada standar pribadinya.³⁰

²⁹ Judge, W. Q., McNatt, D. B., & Xu, W. 2011. The Antecedents And Effects Of National Corruption: A Meta-Analysis. *Journal of World Business*, Vol. 46(1). Hlm.93–103. doi:10.1016/j.jwb.2010.05.021.

³⁰ Huebner, E. S., Suldo, S. M., & Gilman, R. 2006. Life Satisfaction. In G. G. B. K. M. Minke (Ed.), *Children's needs III: Development, Prevention, And Intervention*. Washington, DC: National

Seseorang yang puas dengan kehidupannya cenderung untuk berpartisipasi dalam organisasi masyarakat, dan umumnya lebih peduli dengan masalah sosial serta politik dibandingkan mereka yang kurang puas.³¹ Apakah peningkatan indeks kepuasan hidup ini juga ada hubungannya dengan peningkatan terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pilpres Tahun 2019 Sumatera Barat?

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dijabarkan serta penjelasan dari beberapa literatur penelitian terdahulu jika dikaitkan maka dapat dinyatakan hipotesis utama yakni: 1. Terdapat pengaruh dari persepsi korupsi terhadap partisipasi politik dalam Pilpres Tahun 2019 di Sumatera Barat, 2. Terdapat pengaruh dari kepuasan hidup terhadap partisipasi politik dalam Pilpres Tahun 2019 di Sumatera Barat, dan 3. Terdapat pengaruh secara bersamaan dari persepsi korupsi dan kepuasan hidup terhadap partisipasi politik dalam Pilpres Tahun 2019 di Sumatera Barat.

Masing-masing hipotesis tersebut juga dapat dijelaskan dengan argumentasi sebagai berikut: (1). Jika angka persepsi korupsi tinggi maka angka partisipasi politik akan turun, (2). Jika angka kepuasan hidup tinggi maka angka partisipasi politik akan meningkat. Sehingga, yang menjadi rumusan masalah dan pertanyaan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh persepsi korupsi dan kepuasan hidup terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pilpres Tahun 2019 di Sumatera Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Association of School Psychologists. Hlm. 357–368

³¹ Veenhoven, R. 1988. The Utility Of Happiness. *Social Indicators Research*, Vol. 20, (4). Hlm. 333–354. doi:10.1007/BF00302332.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh persepsi korupsi terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pilpres Tahun 2019 di Sumatera Barat

2. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh kepuasan hidup terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pilpres Tahun 2019 di Sumatera Barat

3. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh persepsi korupsi dan kepuasan hidup terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pilpres Tahun 2019 di Sumatera Barat

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan baru tentang hubungan persepsi korupsi dan kepuasan hidup terhadap tingkat partisipasi politik. Dengan mengetahui hubungan antara variabel-variabel tersebut maka akan menambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik.

Sehingga akan menjadi dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya dalam mengembangkan teori partisipasi politik. Penelitian ini juga memberikan manfaat dalam mengembangkan teori tentang partisipasi politik, dan menambah kekayaan teori penilaian tingkat partisipasi politik di Indonesia karena dapat mencerminkan tingkat partisipasi politik di daerah yang memiliki keunikan nilai budaya dan politik lokal.

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran teoritis bagi ilmu politik mengenai kepemiluan, khususnya pada tema partisipasi politik dalam



pemilu. Para peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu referensi yang akan membahas lebih lanjut kajian tentang partisipasi politik dalam pemilu. Hasil penelitian ini juga menawarkan suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai tingkat partisipasi politik bagi penyelenggara pemilu, dan *stakeholder* kepemiluan lainnya dalam memperbaiki tingkat partisipasi politik dalam pemilu ke depan.

Secara praktis, penelitian ini penting karena menghasilkan sebuah rumusan model yang terbukti secara empiris melalui proses pengumpulan data lapangan. Rumusan model ini akan dapat digunakan oleh banyak pihak untuk mengevaluasi dan memperbaiki tingkat partisipasi politik. Sehingga, dapat dijadikan pembanding tingkat partisipasi politik dari waktu ke waktu dalam pemilu yang dilaksanakan.

Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar pertimbangan bagi para *stakeholder* terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai *leading sector* utama, yang bertanggung jawab atas naik dan turunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu-pemilu yang diselenggarakan. Selain itu hasil penelitian ini dapat digunakan oleh berbagai pihak lainnya seperti parpol dan kandidat yang akan berkompetisi dalam pemilu untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi politik masyarakat.

